

**KARAKTERISTIK RUMAHTANGGA MISKIN MENURUT
TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PADANG PANJANG**

TESIS

**OLEH :
RINI SALMIRAWATI
07 206 030**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

Karakteristik Rumahtangga Miskin Menurut Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang

oleh : Rini Salmirawati

(Di bawah bimbingan Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA
dan Fery Andrianus, SE, M.Si)

RINGKASAN

Selama tiga puluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan maupun kebijakan khusus. Upaya tersebut antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Operasi Pasar Khusus (OPK), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan RASKIN. Namun kebijakan dan program pengentasan kemiskinan tersebut belum dapat menanggulangi masalah kemiskinan secara optimal.

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya dan kebijakan yang diambil selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan dalam masyarakat. Fenomena ini sangat ironis mengingat setiap tahun program kemiskinan telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang cukup besar. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi waktu dan ruang, sehingga dalam menetapkan strategi maupun kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik rumahtangga miskin

Kota Padang Panjang merupakan kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 23 km² (0,05% dari luas Propinsi Sumatera Barat) serta penduduk berjumlah 50.197 jiwa. Penduduk miskin Kota Padang Panjang berjumlah 2000 jiwa (4,86%). Namun pada tahun 2006 angka ini mengalami peningkatan menjadi 8,61% pada tahun 2006 dan menurun pada tahun 2007 menjadi 6,55%. Dengan kondisi luas wilayah yang kecil dan penduduk yang relatif sedikit ini semestinya kemiskinan dapat dientaskan melalui kebijakan dan program pemerintah. Berapa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di Kota Padang Panjang, baik melalui program pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah Kota Padang Panjang sendiri. Kebijakan dan program tersebut diberikan dengan asumsi bahwa masyarakat miskin adalah homogen, sehingga kebijakan untuk semua penduduk miskin adalah sama tanpa membedakan karakteristik serta tingkat kemiskinan dari rumahtangga miskin tersebut. Dengan demikian kebijakan dan program yang telah dilaksanakan tidak memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan yang signifikan.

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi rumahtangga miskin menurut tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang. Metode analisis yang digunakan adalah metoda deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik rumahtangga miskin berbeda-beda menurut tingkat kemiskinan. Perbedaan karakteristik tersebut juga menimbulkan persoalan yang berbeda-beda pula. Hasil dari keseluruhan penelitian ini adalah strategi dan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang harus menurut tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, Karakteristik Rumahtangga, Strategi dan Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Paradigma pembangunan saat ini tidak hanya dihadapkan pada indikator pertumbuhan pendapatan perkapita saja, tetapi juga harus diukur dengan tiga kriteria sosial ekonomi lain, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan distribusi pendapatan nasional. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Kuncoro, 2000) bahwa tujuan pembangunan erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Paradigma ini didasarkan pada teori pembangunan ekonomi penetesan ke bawah (*the trickle-down theory of economic development*) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan melalui tiga cara : (i) pertumbuhan ekonomi meningkatkan permintaan tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja, (ii) pertumbuhan ekonomi dapat menarik kelebihan tenaga kerja pada sektor pertanian yang mempunyai produktivitas rendah ke sektor non pertanian yang cenderung mempunyai produktivitas lebih tinggi, (iii) pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja (Taifur, 2005).

Asumsi utama teori ini adalah pertumbuhan ekonomi memberi manfaat kepada seluruh penduduk (Killick dalam Taifur, 2005). Namun dalam realitanya asumsi tersebut tidak terbukti karena banyak variabel yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Hal ini terbukti dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan berkurangnya tingkat kemiskinan, misalnya pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Indonesia

meningkat dari 5,0% mencapai 6,1% pada triwulan IV tahun 2006 (IMF dan The Economist, 2007), namun peningkatan pertumbuhan ekonomi justru disertai dengan peningkatan angka kemiskinan.

Selama tiga puluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan maupun kebijakan khusus. Upaya tersebut antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada masa Orde Baru untuk membangun infrastruktur desa dan kegiatan ekonomi berbasis kelompok masyarakat, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Operasi Pasar Khusus (OPK), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan RASKIN. Namun kebijakan dan program pengentasan kemiskinan tersebut belum dapat menanggulangi masalah kemiskinan secara optimal. Sistem penanggulangan secara dinamis, berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering mengalami kendala (Balitbang, 2005). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa upaya dan kebijakan yang diambil selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan dalam masyarakat. Fenomena ini sangat ironis mengingat setiap tahun program kemiskinan telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang cukup besar.

Fenomena yang dikemukakan mengindikasikan bahwa beberapa aspek perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu aspek tersebut adalah aspek mikro kemiskinan, yang melihat kemiskinan dari sudut individu atau

rumahtangga. Kondisi rumahtangga miskin sangat bervariasi menurut daerah dan waktu, sehingga tidak dapat diatasi dengan satu konsep dan kebijakan perencanaan pengentasan kemiskinan (Taifur, 2005). Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi waktu dan ruang, sehingga dalam menetapkan strategi maupun kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik rumahtangga miskin (Usman, 2006).

Usman (1999) menyatakan bahwa dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakter makro, sektor, komunitas, rumahtangga dan individu (World Bank, 2002 dan Taifur, 2005).

Robinson (2000) menjelaskan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup : (i) masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, (ii) masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), (iii) masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Dengan demikian pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut, agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Dengan teridentifikasinya karakteristik

rumahtangga miskin menurut tingkatan kemiskinan, dapat ditetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat.

Kota Padang Panjang merupakan kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 23 km² (0,05% dari luas Propinsi Sumatera Barat) serta memiliki penduduk berjumlah 50.197 jiwa (BPS, 2007). Berdasarkan data dan informasi kemiskinan tahun 2002, penduduk miskin Kota Padang Panjang berjumlah 2000 jiwa (4,86%). Namun pada tahun 2006 angka ini mengalami peningkatan menjadi 8,61% pada tahun 2006 dan menurun pada tahun 2007 menjadi 6,55%. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Propinsi Sumbar. Namun dengan kondisi luas wilayah yang kecil dan penduduk yang relatif sedikit ini semestinya kemiskinan dapat dientaskan melalui kebijakan dan program pemerintah.

Berapa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di Kota Padang Panjang, baik melalui program pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah Kota Padang Panjang sendiri. Kebijakan dan program tersebut diberikan dengan asumsi bahwa masyarakat miskin adalah homogen, sehingga kebijakan untuk semua penduduk miskin adalah sama tanpa membedakan karakteristik serta tingkat kemiskinan dari rumahtangga miskin. Dengan demikian kebijakan dan program yang telah dilaksanakan tidak memberikan dampak pengentasan kemiskinan yang signifikan.

Selain itu Kota Padang Panjang hanya terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, masing-masing kecamatan memiliki delapan kelurahan. Luas wilayah yang sangat kecil ini menyebabkan Kota Padang Panjang menjadi kota yang memiliki potensi

sangat terbatas, sehingga lapangan pekerjaan di kota ini sangat terbatas. Hal ini merupakan salah satu karakteristik yang rentan terhadap kemiskinan di Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan diperlukan identifikasi karakteristik rumahtangga miskin berdasarkan tingkat kemiskinan yang dialaminya, sehingga dengan demikian pemerintah Kota Padang Panjang dapat melaksanakan kebijakan serta penganggaran yang lebih terarah dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan penelitian yang difokuskan pada pengidentifikasian karakteristik sosial dan ekonomi rumahtangga miskin berdasarkan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang dengan judul penelitian "**Karakteristik Rumahtangga Miskin Menurut Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang**".

1.2 Perumusan Masalah

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan yang signifikan. Salah satu indikasi belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan adalah asumsi masyarakat miskin yang homogen, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan sama untuk masyarakat miskin, sangat miskin dan hampir tidak miskin. Untuk itu perlu identifikasi karakteristik kemiskinan Kota Padang Panjang, sehingga sasaran kebijakan yang dirumuskan akan tepat sasaran sesuai prioritas perencanaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

BAB VII

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi waktu dan ruang, sehingga dalam menetapkan strategi maupun kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diidentifikasi karakteristik rumahtangga miskin, menurut tingkat kemiskinan yang mereka alami. Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik rumahtangga miskin menurut tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang, dengan menggunakan sampel sebanyak 193 rumahtangga miskin. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9,8% rumahtangga miskin di Kota Padang Panjang merupakan rumahtangga dengan kategori tingkat kemiskinan sangat miskin, 39,9% kategori miskin dan 50,3% merupakan rumahtangga hampir tidak miskin. Dengan demikian lebih dari separuh rumahtangga miskin di Kota Padang Panjang berpeluang untuk meningkatkan statusnya menjadi tidak miskin atau berada di atas garis kemiskinan.
- b. Karakteristik rumahtangga sangat miskin sangat berbeda dengan karakteristik yang dimiliki rumahtangga miskin dan hampir tidak miskin. Diantaranya perbedaan yang signifikan adalah rumahtangga ini dikepalai oleh seorang wanita dengan usia rata-rata 71 tahun yang hidup bersama seorang anak atau cucunya, atau bahkan sebatang kara, berusaha sendiri, tidak memiliki anak usia sekolah, memiliki rumah sendiri yang terbuat dari kayu dengan ukuran

yang sangat kecil, walaupun dibangun di lahan yang bukan miliknya serta fasilitas perumahan yang tidak layak. Sedangkan rumahtangga miskin dan rumahtangga hampir tidak miskin memiliki karakteristik yang relatif hampir sama. Namun beberapa perbedaan karakteristik kedua kelompok rumahtangga miskin ini adalah lapangan usaha rumahtangga miskin pada sektor jasa dan pertanian sedangkan rumahtangga hampir tidak miskin bekerja pada sektor jasa, pertanian dan perdagangan. Rumahtangga miskin memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi daripada rumahtangga hampir tidak miskin, karena sebagian besar anggota rumahtangga hampir tidak miskin ikut bekerja untuk menambah pendapatan rumahtangga. Rumahtangga hampir tidak miskin sudah memiliki rumah milik sendiri walau dengan kondisi yang kurang memadai, sedangkan sebagian besar rumahtangga miskin masih tinggal di rumah sewa, sehingga menyebabkan pengeluaran non makanan rumahtangga ini besar.

- c. Kota Padang Panjang memiliki beberapa peluang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah potensi sumber daya alam, ekonomi, pendidikan kesehatan serta infrastruktur yang memadai. Sehingga dengan memanfaatkan peluang ini pemerintah dapat merumuskan kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi kemiskinan yang dialami oleh rumahtangga miskin tersebut.

6.2 Rekomendasi

Dengan mencermati kesimpulan di atas, perumusan strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaklah berdasarkan tingkat kemiskinan yang dialami

DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, U Ahmed, dkk. 2007. *Characteristics and Causes of Severe Poverty and Hunger*. International Food Policy Research Institute. USA. Oktober 2007. www.ifpri.org
- BALITBANG. 2005. *Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat*. Padang : Balitbang.
- Bappenas. 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*
- BPS. 2002. *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta : BPS.
- _____. 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta : BPS.
- _____. 2004. *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta : BPS.
- _____. 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta : BPS.
- Bradshaw, Ted K. 2006. *Theories of Poverty and Anti Poverty Programs in Community development*. RPRC Working Paper No. 06-05. February 2006.
- Darma, Adi. *Kajian Garis Kemiskinan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Timur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 1 No. 1 April 2002.
- Firdausy, Carunia dan Tisdell, Clem. *Rural Poverty and its Measurement : A comparative study of villages in Nusa Penida, Bali*. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 28 N0. 2 August 1992. Australian National University Canberra.
- Ikhsan, Mohamad. 1999. *Disaggregation of Indonesian Poverty : Policy and Analysis*. Unpublished Doctor of Philosophy in Economics in graduate college of the University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Jhingan, M.L. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kasim, Muslim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. Indomedia Global : Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan ; Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.
- Malik, Shahnawaz. 1996. *Determinants of Rural Poverty in Pakistant*. The Pakistan Development Review.